



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 11811-11820

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Strategi Singapura dalam menghadapi Kebijakan Tax Amnesty di Indonesia tahun 2016–2017

Rafqi Syawali^{1✉}, Umi Oktyari Retnaningsih², Yessy Olivia³

Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Riau

email: rafqi.syawali@yahoo.com^{1✉}

Abstrak

Tax Amnesty atau pengampunan pajak merupakan secara umum adalah agenda bagian dari pemerintah dalam bidang perpajakan agar memberikan pengampunan dan penghapusan pajak yang mana harusnya terutang kepada wajib pajak tanpa dikenakan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan bagi wajib pajak, berdasarkan ketentuan yang berlaku bahwa wajib pajak diharuskan untuk membuat surat pernyataan tentang transparansi harta yang wajib pajak miliki, serta wajib membayar tebusan dalam jumlah yang ditentukan sebagai bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan wajib pajak dalam memberikan penerimaan pajak kepada negara. Tesis ini menjelaskan strategi Singapura dalam menghadapi kebijakan Tax Amnesty di Indonesia. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dimana tujuan penulisan tesis ini untuk menjelaskan keadaan dan situasi secara tersistematis, akurat dan faktual. Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang menggambarkan fenomena hingga karakteristik yang sedang diteliti. Akhirnya metode penelitian ini yang menjadi fokus utamanya adalah menjelaskan objek penelitiannya. Strategi Singapura untuk meningkatkan pendapatan negara, tax amnesty bisa mendapatkan legalitas. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Pertama soal payung hukum. Tax amnesty adalah kebijakan *extraordinary* sehingga menuntut payung hukum yang sangat kuat. Kedua, pengampunan sebaiknya tidak diberlakukan pada unsur tindak pidana, melainkan pada aspek administratif, misalnya denda dan sanksi. Ketiga, penegakan hukum terhadap unsur pidana tidak boleh diabaikan begitu saja demi mengejar pemasukan negara, apalagi dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur yang merugikan negara

Abstract

Tax Amnesty or tax amnesty is generally the agenda of the government in the field of taxation to provide forgiveness and write off taxes which should be owed to taxpayers without being subject to tax administration sanctions and tax criminal sanctions for taxpayers, based on the applicable provisions that taxpayers are required to pay. to make a statement regarding the transparency of the assets that the taxpayer owns, as well as being obliged to pay a ransom in the specified amount as a form of responsibility carried out by the taxpayer in providing tax revenues to the state. This thesis explains Singapore's strategy in confronting the Tax Amnesty policy in Indonesia. In this research, the author uses a descriptive type of research where the aim of writing this thesis is to explain conditions and situations in a systematic, accurate and factual manner. Descriptive qualitative research method is a research method that describes the phenomena and characteristics being studied. Finally, the main focus of this research method is explaining the object of the research. Singapore's strategy to increase state revenue, tax amnesty could gain legality. However, there are several things that need to be emphasized. First, regarding the legal umbrella. Tax amnesty is an extraordinary policy so it requires a very strong legal umbrella. Second, forgiveness should not be applied to criminal elements, but rather to administrative aspects, for example fines and sanctions. Third, law enforcement against criminal elements must not be ignored in order to pursue state income, especially in these criminal acts there are elements that are detrimental to the state.

Keywords: *Tax Amnesty, Indonesia, Singapura, Strategic.*

PENDAHULUAN

Tax Amnesty atau pengampunan pajak merupakan secara umum adalah agenda bagian dari pemerintah dalam bidang perpajakan agar memberikan pengampunan dan penghapusan pajak yang mana harusnya terutang kepada wajib pajak tanpa dikenakan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan bagi wajib pajak, berdasarkan ketentuan yang berlaku bahwa wajib pajak diharuskan untuk membuat surat pernyataan tentang transparansi harta yang wajib pajak miliki, serta wajib membayar tebusan dalam jumlah yang ditentukan sebagai bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan wajib pajak dalam memberikan penerimaan pajak kepada negara.¹

¹Sandra, Sejarah Tax Amnesty Di Indonesia, di akses melalui <https://www.pajakku.com/read/60a6404ceb01ba1922ccac3a/Sejarah-Tax-Amnesty-di-Indonesia>, pada tanggal 18 Januari 2022, pukul 14.30 Wib

Sedikit sejarah bahwa Indonesia pertama kali memberlakukan kebijakan *Tax Amnesty* pada tahun 1964 pada era kepemimpinan presiden Soekarno. Berdasarkan keputusan presiden yaitu penetapan presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1964 tentang pengampunan pajak. *Tax Amnesty* pada tahun 1964 itu bertujuan untuk mengembalikan dana revolusi. Penerapan pengampunan pajak pada tahun 1964 memiliki beberapa hambatan yang mana menjadi salah satunya adalah banyaknya pungutan yang ditetapkan di luar kebijakan yaitu di antaranya gekerev dan SWI Dwikora yang dapat menurunkan daya bayar pajak bagi para wajib pajak. Pada penerapan *Tax Amnesty* tahun 1964 memiliki jumlah yang sama dengan penerimaan sumbangan wajib pajak istimewa (SWI) Dwikora, yang mana diharapkan penerimaan dana dari *Tax Amnesty* lebih besar dari pada penerimaan SWI Dwikora. Kemudian yang menjadi hambatan adalah adanya gerakan G30S/PKI, penerapan kebijakan *Tax Amnesty* 1964 dianggap gagal. Kemudian pada tahun 1984 di era kepresidenan Soeharto, Indonesia kembali menerapkan kebijakan *Tax Amnesty* berdasarkan keputusan presiden nomor 26 tahun 1984 tentang pengampunan pajak.

Indonesia baru menerapkan serangkaian peraturan tentang perpajakan yang baru terbangun. Lanjut pada tahun 2008 di era presiden SBY, Indonesia kembali menerapkan kebijakan pengampunan pajak yang pada saat itu dikenal dengan istilah *Sunset Policy*. Penerapan *Sunset Policy* pada tahun ini dianggap berhasil berdasarkan realisasi yang diharapkan sesuai dengan target dalam ketentuan APBN, namun tetap masih memiliki hambatan yaitu kepatuhan bagi wajib pajak untuk melakukan hak dan kewajiban perpajakan sangat masih rendah. Wajib untuk diketahui bahwa *Sunset Policy* itu berbeda dengan *Tax Amnesty*, *Sunset Policy* dapat diartikan secara umum merupakan kebijakan menghapuskan denda administrasi dengan tetap harus membayarkan pokok wajib pajak bagi orang atau badan usaha secara penuh yang sesuai dengan ketentuan umum yang sudah tertera dalam undang-undang, dan dalam penerapan kebijakan *Sunset Policy* tidak ada istilah tentang pembebasan atas tuntutan pidana pajak.²

Penerapan kebijakan *Tax Amnesty* diusung oleh pemerintah Indonesia di tengah Ekonomi Indonesia sedang lesu, ini menjadikan kebijakan ini sebagai senjata yang ampuh untuk meningkatkan pendapatan Indonesia dalam waktu yang cepat demi pembangunan di Indonesia. *Tax Amnesty* dilakukan untuk menarik uang WNI yang berada di luar negeri yang dianggap menyimpan uangnya secara rahasia dinegara-negara bebas pajak. Diharapkan pada penerapan kebijakan *Tax Amnesty* kali ini adalah mampu benar dapat menarik kembali uang WNI yang ada di luar negeri dengan imbalan uang tebusan yang

² *Ibid.*,

sangat murah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang menggambarkan fenomena hingga karakteristik yang sedang diteliti. Akhirnya metode penelitian ini yang menjadi fokus utamanya adalah menjelaskan objek penelitiannya.³ Proses pemecahan masalah pada metode penelitian deskriptif difungsikan untuk menjelaskan suatu permasalahan penelitian secara mendalam atau tersistematis dan menyelidiki dengan menggambarkan keadaan subjek dan objek penelitian saat sekarang berdasarkan fakta dengan bentuk apa adanya.⁴ Penulis juga menetapkan batasan penelitian tentang *Bagaimana Strategi Singapura dalam Menghadapi Kebijakan Tax Amnesty di Indonesia tahun 2016–2017*.

Strategi Pemerintah Singapura.

Pemerintah Indonesia dan Singapura sepakat untuk meningkatkan kerja sama kedua negara di bidang ekonomi. Kesepakatan tersebut tercapai usai pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien. Di tengah lesunya perekonomian dunia saat ini, Singapura sebagai mitra utama Indonesia dalam bidang perdagangan tercatat masih menunjukkan peningkatan investasinya di Indonesia. Dari bulan Januari hingga September 2016 lalu misalnya, investasi yang dikururkan pemerintah Singapura di Indonesia mencapai USD 7,1 milyar atau mengalami kenaikan sebesar 44% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain itu, kedua negara juga sepakat memperkuat kerja sama di bidang pariwisata. Salah satu hal yang dibicarakan keduanya terkait pariwisata ialah pengembangan destinasi wisata baru di Indonesia. Lebih lanjut, PM Lee juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kerja sama di berbagai bidang antara lain:

1. Investasi di kawasan Batam, Bintan, Karimun, serta kawasan lain di daerah Indonesia, termasuk Kawasan Industri Kendal yang akan segera dibuka;
2. Bidang Pariwisata yaitu dengan peningkatan jumlah arus wisatawan antar kedua negara, termasuk membuka jalur pelayaran kapal pesiar;
3. Sektor energi, dengan berkontribusi dalam proyek 35.000 MW di Indonesia;
4. Membentuk sebuah asosiasi bisnis Indonesia Singapura untuk meningkatkan hubungan bisnis antar kedua negara;

³ Dunia dosen, pengertian penelitian deskriptif, karakter, ciri- ciri dan contohnya, diakses melalui <https://www.duniadosen.com/penelitian-deskriptif/>, pada tanggal 24 Januari 2022 pukul 19.00 Wib

⁴ Hadari Nawawi, 1990, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gadjah Mada Press: Yogyakarta

5. Kerja sama di bidang pencegahan terorisme.⁵

Dalam hubungan bilateral dengan Singapura, sebagai negara tetangga terdekat dan mitra strategis, hubungan bilateral Indonesia semakin kokoh, semakin kuat. Kedekatan Singapura dan Indonesia terlihat dari tingginya frekuensi kunjungan para pemimpin dan pejabat tinggi. Presiden Joko Widodo mengunjungi Singapura untuk *Leaders' Retreat* pada bulan Maret tahun ini dan pada awal Juni untuk berbicara di *Ecosperity Week*.

Negara Singapura juga menjalin kerja sama pada bidang perdagangan, dengan menjadi mitra dagang paling strategis dan terbesar di ASEAN. Indonesia juga merupakan mitra dagang terbesar ke-2 Singapura di ASEAN, dengan pangsa 17% dari total perdagangan. Total nilai perdagangan bilateral tahun 2022 mencapai US\$ 33,8 miliar, meningkat 24,6% *year-on-year* dibandingkan tahun 2021. Nilai ini merupakan nilai tertinggi ke-2 dalam lima tahun terakhir dan terbesar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kepentingan dan Respon Pemerintah Singapura Terhadap Kebijakan Pengampunan Pajak di Indonesia.

Hubungan Indonesia dengan Singapura adalah hubungan bilateral antara Republik Indonesia dengan Republik Singapura. Dari tahun ke tahun, Indonesia dan Singapura membina hubungan kunjungan kenegaraan tingkat tinggi. Hubungan ini ditandai dengan kerja sama ekonomi yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, Singapura secara konsisten menjadi investor asing terbesar di Indonesia. Kerja sama antara Indonesia dan Singapura juga meliputi beberapa bidang, termasuk kesehatan, pertahanan, dan lingkungan hidup.

Hubungan antara Indonesia dan Singapura kebanyakan didorong karena kedekatan geografis. Singapura merupakan salah satu negara tetangga Indonesia. Wilayah negara kota ini dikepung wilayah Indonesia di bagian barat, selatan, dan timur, terjepit di antara Malaysia dan Indonesia. Kedua negara adalah pendiri ASEAN, dan negara anggota Gerakan Non-Blok dan APEC.

Pemerintah Indonesia dan Singapura sepakat untuk meningkatkan kerja sama kedua negara di bidang ekonomi. Kesepakatan tersebut tercapai usai pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien. Di tengah lesunya perekonomian dunia saat ini, Singapura sebagai mitra utama Indonesia dalam bidang

⁵ “Hubungan Diplomatik Indonesia”. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2300/memasuki-50-tahun-hubungan-diplomatik-indonesia-singapura-sepakat-tingkatkan-kerja-sama>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023

perdagangan tercatat masih menunjukkan peningkatan investasinya di Indonesia. Dari bulan Januari hingga September 2016 lalu misalnya, investasi yang dikururkan pemerintah Singapura di Indonesia mencapai USD 7,1 milyar atau mengalami kenaikan sebesar 44% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Strategi Singapura dalam menghadapi Kebijakan Tax Amnesty Di Indonesia Tahun 2016–2017.

Bank-bank yang bermarkas di Singapura mendadak gerah dengan kebijakan amnesti pajak di Indonesia. Langkah pemerintahan Joko Widodo menarik pulang aset-aset milik wajib pajak di luar negeri direspons bank negara tetangga itu dengan ancaman pelaporan data transaksi mencurigakan peserta tax amnesty ke kepolisian setempat. Upaya untuk menakut-nakuti Warga Negara Indonesia (WNI) agar tidak menjadi peserta *tax amnesty* itu kabarnya didalangi oleh *Otoritas Moneter Singapura* (MAS). Baru-baru ini, MAS membantah berupaya menjegal kebijakan amnesti pajak Indonesia. Namun, pernyataan bank sentral Singapura itu bersayap karena di sisi lain MAS mengharuskan perbankan melaporkan transaksi mencurigakan (*Suspicious Transaction Report* atau STR) sesuai ketentuan *Financial Action Task Force* (FATC).⁶

Kekhawatiran Singapura terhadap kebijakan pengampunan pajak Indonesia coba digambarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan mengungkap jumlah dana milik WNI yang selama ini menghuni brankas bank-bank negeri Merlion. Mengutip riset konsultan internasional, ia menyebut nilainya mencapai Rp2.600 triliun. Dari US\$250 miliar atau Rp3.250 triliun harta orang-orang terkaya di Indonesia di luar negeri. Sekitar US\$200 miliar di antaranya atau Rp2.600 triliun disimpan di Singapura. Apabila hitungan Sri Mulyani itu tepat, maka seluruh aset WNI itu nilainya sekitar 67,5 persen dari total Produk Domestik Burto Singapura. Bank Dunia mencatat, nilai PDB Singapura pada tahun lalu nilainya sebesar US\$292,73 miliar atau setara dengan Rp3.852 triliun (kurs Rp13.160 per dolar).

Menurut Sri Mulyani wajar jika kemudian Singapura melakukan segala cara menggagalkan upaya Indonesia menarik dana milik warganya. Bisa dibayangkan jika kebijakan amnesti itu berhasil dengan sempurna menarik seluruh aset WNI tersebut. Perekonomian Singapura bisa dipastikan semaput karena PDB nominalnya susut lebih dari separuhnya menjadi tinggal Rp1.252 triliun. Ancaman itu akan melengkapi perlambatan ekonomi yang mendera Singapura di hampir setengah dekade terakhir. Pada 2010, perekonomian Singapura mencapai puncaknya dengan tumbuh hingga 15,2%. Setelah itu,

⁶ “Ekonomi Singapura”. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160922163811-78-160375/e_ekonomi-singapura-terancam-rontok-jika-tax-amnesty-ri. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023

laju PDB-nya terjun bebas dengan hanya tumbuh 6,2% pada 2011 dan semakin melandai menjadi hanya 2% pada 2015. Jika diamati data MAS, peran sektor keuangan terhadap PDB Singapura sangat dominan, bergerak dari 32% pada 2010 hingga menembus 47% pada 2015. Dana yang akan keluar dari perbankan Singapura, dipastikan akan menekan dana pihak ketiga (DPK) dan memicu kekeringan likuiditas.⁷

Sejauh ini, proses amnesti pajak WNI di Singapura tidak mengalami kendala berarti. Direktorat Jenderal Pajak mencatat per 15 September 2016 mayoritas dana repatriasi dan harta yang diungkapkan wajib pajak berasal dari Singapura. Nilai aset repatriasinya mencapai Rp14,09 triliun atau 76,14 persen dari total repatriasi dan harta bersih yang diungkapkan wajib pajak Rp103,16 triliun.⁸

Otoritas Moneter Singapura (MAS) mengklarifikasi kabar soal dugaan upaya penjejalan program amnesti pajak Indonesia itu. Melalui akun Facebook resmi, Kedutaan Besar Singapura di Jakarta menegaskan, MAS justru menyarankan bank di Singapura mendorong WNI memanfaatkan program pengampunan pajak. Namun, MAS menekankan perbankan tetap harus mematuhi ketentuan standar *Financial Action Task Force* (FATF) yang mewajibkan pelaporan data transaksi mencurigakan atau *suspicious transaction report* (STR), tak terkecuali bagi nasabah peserta *tax amnesty*.⁹

Ketika Singapura merespons sedemikian rupa terkait dengan *tax amnesty*, ini menunjukkan bahwa program ini merupakan kebijakan yang tepat dalam rangka mereformasi sistem pajak Indonesia, dan dalam rangka menarik modal untuk masuk Indonesia. Singapura merupakan negara favorit warga negara Indonesia (WNI) menyimpan dana mereka. Rendahnya pajak di Negeri Singapura tersebut menyedot para WNI untuk memarkir harta-harta mereka. Dana wajib pajak Indonesia yang disimpan di Singapura diperkirakan mencapai Rp 3.000 triliun, baik yang telah dilaporkan maupun yang belum dilaporkan. Jumlah tersebut sekitar 56% dari total simpanan, yang ada di perbankan Singapura yang mencapai Rp 5.300 triliun.

Dana tersebut dijadikan likuiditas untuk pembangunan di Singapura. Bila seluruh dana WNI yang ada bisa ditarik kembali ke Indonesia melalui *tax amnesty*, maka sistem likuiditas Singapura akan terganggu. Jika likuiditasnya rendah, akan terjadi krisis perbankan

⁷ "Ekonomi Singapura Terancam Rontok jika Tax Amnesty RI Sukses". <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160922163811-78-160375/ekonomi-singapura-terancam-rontok-jika-tax-amnesty-ri-sukses>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023

⁸ "Menko Darmin Sudah Menduga Singapura Akan Jegal Tax Amnesty". <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160916131930-78-158793/menko-darmin-sudah-menduga-singapura-akan-jegal-tax-amnesty>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023

⁹ "Wiranto ke Istana Bahas Amnesti Pajak yang Disoal Singapura". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160916121011-20-158787/wiranto-ke-istana-bahas-amnesti-pajak-yang-disoal-singapura>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023

yang luar biasa, lantaran hal itulah, Singapura sangat berkepentingan menjaga agar dana para WNI tetap berada di kas bank Singapura.¹⁰

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, bank di Singapura tidak tinggal diam menghadapi program *tax amnesty* dari pemerintah Indonesia. Sadar ada potensi penarikan dana cukup besar dari pemilik modal dari negara tetangganya, perbankan negeri Singa itu menawarkan paket pembayaran pajak gratis. Tawaran paket pembayaran pajak secara gratis atas deklarasi dana pemilik modal asal Indonesia oleh perbankan Singapura itu tentu saja ada syaratnya. Fasilitas itu akan diberikan dengan syarat dana yang tersimpan di bank negara itu tidak ditarik dan dipindahkan ke Indonesia.

Menurut Hariyadi Bank di Singapura coba memengaruhi orang yang ikut repatriasi. Dengan cara mereka kasih penawaran duitnya jangan ditarik, tapi dengan cara dia yang bayar repatriasi 4% (tebusan deklarasi *tax amnesty*). Sebab, hal itu bisa memengaruhi likuiditas di negara itu. Itu juga sekaligus membuktikan bahwa program *tax amnesty* memang menarik dan berpotensi dimanfaatkan oleh pemilik dana asal Indonesia. Optimistis program pengampunan pajak itu akan berjalan sukses. Padahal di awal sempat kurang yakin partisipasinya akan sesuai ekspektasi pemerintah. Awalnya punya keyakinan mungkin antara Rp 2.000 triliun sampai Rp 3.000 triliun, yang repatriasi Rp 700-an triliun, sisanya deklarasi.¹¹

Perbankan Singapura telah diminta oleh *Monetary Authority of Singapore* memfasilitasi, memberikan kemudahan para nasabahnya yang akan melakukan amnesti pajak dalam rangka untuk repatriasi atau bayar uang tebusan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa bank-bank di Singapura telah diminta oleh *Monetary Authority of Singapore* memfasilitasi, memberikan kemudahan para nasabahnya yang akan melakukan amnesti pajak dalam rangka untuk repatriasi atau bayar uang tebusan. Hal ini diungkapkan Sri Mulyani menanggapi pemberitaan yang menyebut bahwa memuat pemerintah Singapura ada suatu kebijakan dari bank yang melaporkan transaksi dari nasabahnya yang wajib pajak Indonesia yang mengikuti amnesti pajak di dalam konteks *financial action task force* di Indonesia. Dalam aturan tersebut, kalau transaksi itu mencurigakan bisa diadukan kepada kepolisian Singapura, karena dianggap melakukan pelanggaran di bidang UU Perpajakan dan bisa dianggap kriminal.

¹⁰ “Singapura Alami Kepanikan Hadapi Kebijakan Tax Amnesty di Indonesia”. <https://bangka.tribunnews.com/2016/09/17/singapura-alami-kepanikan-hadapi-kebijakan-tax-amnesty-di-indonesia-ini-alasannya>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023

¹¹ “Singapura Jegal Tax Amnesty”. <https://pengampunanpajak.com/2016/07/16/singapura-jegal-tax-amnesty-gratiskan-pajak-dana-wni/>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023

Menkeu mengatakan apa ada kebijakan yang menghambat para wajib pajak Indonesia yang menaruh uangnya dalam perbankan Singapura untuk ikut program amnesti pajak. Indonesia menegaskan bahwa kita tidak ingin amnesti pajak Indonesia (terganggu), karena kita juga sudah melihat profil pengikut amnesti pajak yang berasal dari luar negeri memang mayoritas paling banyak berasal dari Singapura. Menkeu mengungkapkan bahwa *Monetary Authority of Singapore* justru meminta kepada bank memfasilitasi dan memberikan kemudahan bagi para nasabahnya yang akan melakukan amnesti pajak dalam rangka untuk repatriasi atau bayar uang tebusan. Singapura melaksanakan pelaporan oleh bank dalam rangka FATF berkonteks mendeteksi terjadinya aliran dana ilegal atau dana kriminal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka ada beberapa strategi yang dilaksanakan oleh Negara Singapura dalam menghadapi kebijakan Tax Amnesty di Indonesia Tahun 2016-2017, diantaranya:

1. Bank di Singapura coba memengaruhi orang yang ikut repatriasi. Dengan cara memberikan penawaran duitnya jangan ditarik, tapi dengan cara dia yang bayarin repatriasi 4 persen (tebusan deklarasi tax amnesty).
2. Bank-bank di Singapura melalui *Monetary Authority of Singapore* memfasilitasi, memberikan kemudahan para nasabahnya yang akan melakukan amnesti pajak dalam rangka untuk repatriasi atau bayar uang tebusan
3. Singapura menawarkan kewarganegaraan kepada anggota keluarga Indonesia yang menyimpan uang di Singapura.
4. Singapura meminta agar WNI hanya mendeklarasikan asetnya yang ada di dan pihak bank akan membayar selisih antara tarif repatriasi dengan deklarasi aset;
5. Singapura memberikan kemudahan mendapatkan kewarganegaraan Singapura.
6. Singapura memberikan jaminan kerahasiaan data. Upaya tersebut dijalankan secara *private* atau *person to person*. Alih-alih repatriasi, WNI dirayu untuk hanya mendeklarasikan kepemilikan asetnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunia dosen, pengertian penelitian deskriptif, karakter, ciri- ciri dan contohnya, diakses melalui <https://www.duniadosen.com/penelitian-deskriptif/>, pada tanggal 24 Januari 2022 pukul 19.00 Wib.
- "Ekonomi Singapura". <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160922163811-78-160375/e-ekonomi-singapura-terancam-rontok-jika-tax-amnesty-ri>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023.
- "Ekonomi Singapura Terancam Rontok jika Tax Amnesty RI Sukses". <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160922163811-78-160375/ekonomi-singapura-terancam-rontok-jika-tax-amnesty-ri-sukses>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023.
- Hadari Nawawi, 1990, Metode Penelitian Bidang Sosial, Universitas Gadjah Mada Press: Yogyakarta.
- "Hubungan Diplomatik Indonesia". <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2300/memasuki-50-tahun-hubungan-diplomatik-indonesia-singapura-sepakat-tingkatkan-kerja-sama>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023.
- "Menko Darmin Sudah Menduga Singapura Akan Jegal Tax Amnesty". <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160916131930-78-158793/menko-darmin-sudah-menduga-singapura-akan-jegal-tax-amnesty>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023.
- "Singapura Alami Kepanikan Hadapi Kebijakan Tax Amnesty di Indonesia". <https://bangka.tribunnews.com/2016/09/17/singapura-alami-kepanikan-hadapi-kebijakan-tax-amne-di-indonesia-ini-alasannya>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023.
- "Singapura Jegal Tax Amnesty". <https://pengampunanpajak.com/2016/07/16/singapura-jegal-tax-amnesty-gratiskan-pajak-dana-wni/>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023.
- Sandra, Sejarah Tax Amnesty Di Indonesia, di akses melalui <https://www.pajakku.com/read/60a6404ceb01ba1922ccac3a/Sejarah-Tax-Amnesty-di-Indonesia>, pada tanggal 18 Januari 2022, pukul 14.30 Wib.
- "Wiranto ke Istana Bahas Amnesti Pajak yang Disoal Singapura". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160916121011-20-158787/wiranto-ke-istana-bahas-amnesti-pajak-yang-disoal-singapura>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023.